



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**KASUS TPP SELUMA 2017  
KEJATI SURATI KEMENDAGRI**

**BENGKULU** - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam waktu dekat akan menyurati Biro Hukum Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dilakukan Kejati Bengkulu guna melanjutkan penyelidikan terkait dana Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Kabupaten Seluma Tahun 2017.

Kajati Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Henri Nainggolan, SH, MH mengungkapkan, dengan menyurati Biro Hukum Dirjen Keuangan dan Kemendagri tersebut pihaknya berharap bisa mendapatkan petunjuk mengenai aturan dalam penyaluran TPP oleh

pemerintah daerah. "Suratnya sudah kita siapkan, dalam waktu dekat ini akan kita sampaikan ke Biro Hukum Kemendagri. Kita mengirimkan surat ini untuk meminta petunjuk dari mereka guna melanjutkan penyelidikan yang saat ini tengah kita lakukan," terang Henri.

Nanti bila sudah ada petunjuk dari Biro Hukum di Dirjen Keuangan dan Kemendagri mengenai aturan yang dilanggar dalam penyaluran TPP di Kabupaten Seluma, maka Ke-



**BAGINDA POLIN LUMBAN**

jati Bengkulu akan langsung mengambil langkah penyelidikan lebih lanjut. "Kita perlu tahu aturan dan rambu-rambu apa yang harus dijalani dalam penyaluran TPP. Setelah itu baru kita bisa menentukan langkah selanjutnya, apakah ini benar ada pelanggaran atau tidak," ungkapnya.

Diketahui, sebelumnya besaran TPP PNS Pemkab Seluma menuai protes. Hal ini lantaran sejumlah PNS Seluma merasa ada kesenjangan besaran TPP di OPD yang ber tipe A dan C.

Pasalnya, besaran TPP pada OPD yang termasuk kedalam TP4D, seperti jabatan Kepala Bidang (Kabid) di salah satu OPD yang besaran TPP nya mencapai Rp 14 juta, bahkan ada yang Rp 16 juta.

Tentunya lebih besar dari Kepala OPD tipe A seperti di Dinas PU yang hanya menerima TPP sebesar Rp 13 juta. Bahkan dari informasi yang disampaikan untuk kepala bagian (Kabag) dilingkungan Sekretariat Pemkab Seluma menerima TPP sebesar Rp 12 juta setiap bulannya.

Bahkan untuk tahun 2018 ini, besaran pagu anggaran untuk pembayaran TPP mencapai Rp 65 miliar. Hal ini tentunya akan kembali memperuncing polemik bila direalisasikan. (sly)